



**PERAN SYAHBANDAR MELAKUKAN PENGAWASAN DALAM MENJAMIN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 51 TAHUN 2015**  
(studi di angkutan pelayaran-rakyat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau



**OLEH :**

**M. SABIQ MUZAKI**  
**NIM : 11527103117**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**PERSETUJUAN**

Skripsi ini berjudul **“Peran Syahbandar Melakukan Pengawasan Dalam Menjamin Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015.(studi di angkutan pelayaran-rakyat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)”** yang ditulis oleh :

Nama : M.Sabiq Muzaki  
NIM : 11527103117  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang muncasah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru 25 juni 2020  
Pembimbing Kripsi

  
Mohd. Kastulan, S.H, M.H  
NIP. 19630909 199002 1 001

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Mohd, Kastulani, S.H., M.H

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 25 JULI 2020

No :

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr. M. SABIQ MUZAKI

*Asslamu'alaikum. Wr.Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara M. SABIQ MUZAKI, yang berjudul **"peran syahbandar melakukan pengawasan dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor 51 tahun 2015 \*(studi diangkutan laut pelayaran-rakyat kecamatan tebing tinggi kabupaten kepulauan meranti)"** dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing

  
H. Mohd. Kastulani, S.H., M.H  
NIP. 19630909 199002 1 001

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul, **“PERAN SYAHBANDAR MELAKUKAN PENGAWASAN DALAM MENJAMIN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 51 TAHUN 2015 (studi di angkutan pelayaran-rakyat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)”** yang ditulis oleh :

Nama : M. SABIQ MUZAKI  
NIM : 11527103117  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :  
Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Secara Online (Daring)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Agustus 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, M.A.**

Sekretaris  
**Ilham Akbar, SH.,MH.**

Penguji I  
**Syafrinaldi,SH.,MA**

Penguji II  
**H. Mhd. Kastulani, SH.,MH.**

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 196803 1 005

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: M. Sabiq Muzaki
NIM	: 11527103117
Tempat/Tanggal Lahir	: Batang Malas, 03 Mei 1996
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Universitas	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"PERAN SYAHBANDAR MELAKUKAN PENGAWASAN DALAM MENJAMIN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 51 TAHUN 2015 (studi di angkutan pelayaran-rakyat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)"** adalah benar hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri, duplikat, plagiat, dan/atau dibuat oleh orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian besar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 Agustus 2020

Yang Membuat Pernyataan

  
**M. SABIQ MUZAKI**  
 NIM. 11527103117

UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## ABTSRAK

Peraturan Menteri Perhubungan pasal 1 angka 12, kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, keselamatan dan keamanan, pelayaran adalah suatu keadaan yang menyangkut terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim sebagaimana yang tertera dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008.

Masalah pokok dalam penelitian ini ialah bagaimana peran syahbandar melakukan pengawasan dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran rakyat serta kendala dan penghambat yang dihadapi oleh syahbandar dalam menjalankan pengawasan pelayaran guna menjamin keselamatan dan keamanan di pelayaran rakyat yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 51 tahun 2015.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya yaitu tergolong kedalam jenis penelitian hukum sosiologis, penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi pelaksanaan hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dimasyarakat dengan cara penulis melakukan penelitian langsung kelokasi penelitian, sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif, populasi dalam penelitian ini ialah kepala petugas keselamatan berlayar penjagaan dan patroli, kepala petugas lalu lintas angkutan laut dan usaha kepelabuhanan, kepala seksi angkutan dinas perhubungan serta para penyedia jasa angkutan pelayaran rakyat di Kecamatan Tebing Tinggi, dengan seluruh populasinya penulis ambil sebagai sampel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelayaran rakyat yang dilakukan oleh syahbandar berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor 51 tahun 2015 terkesan belum maksimal dengan ditandai adanya kapal-kapal pelayaran yang digunakan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tertera dalam pasal 32 undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, kendala-kendala yang dihadapi oleh syahbandar dalam menjalankan pengawasan ialah belum terjangkaunya seluruh objek pengawasan karena keterbatasan sumberdaya manusia dan kesadaran para pengusaha kapal-kapal pelayaran rakyat mengenai jaminan keselamatan dan kemanan para penumpang seperti penyediaan alat keselamatan yang berada diatas kapal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PERAN SYAHBANDAR MELAKUKAN PENGAWASAN DALAM MENJAMIN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 51 TAHUN 2015 (Studi di angkutan laut pelayaran-rakyat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)** dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Shalawat dan salam tetapa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw yang telah berjasa dan berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang di ridhoi oleh Allah swt.

Penulisan skripsi ini ialah bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk melengkapi skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga serta penghargaan yang tertinggi-tinggimya kepada:

1. Ayahanda Hisyam dan Ibunda Khurosah, yang merupakan orang tua dari penulis yang telah berjasa mendidik membesarkan penulis dari kandungan sampai besar saat ini. Serta Kakek, Nenek, Paman dan Bibi penulis serta yang terkhususkan untuk saudara-saudara penulis yaitu, Arini Masadah,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wabil rusda dan yang lain yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk cepat menyelesaikan program Sarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin , M.Ag selaku Rektor, Bapak Dr. Drs. H. Suryan A.Jamrah, MA selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Ahmad Supardi MA selaku Wakil Rektor II, Drs H. Promadi, MA., Ph.D. selaku Wakil rektor III dari Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. Heri Sunandar,M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.Wahidin, M.Ag selaku wakil Dekan II, Bapak Dr, H.Maghfirah, MA selaku wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau,yang telah banyak memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan .
4. Bapak Firdaus, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim,S.Ag,S.H,M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau beserta seluruh staf-stafnya.
5. Ibu musrifah, S.H, M.H, selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
6. Bapak Kastulani, S.H, M.H.,selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan, nasehat, masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak bimbingan serta Ilmu Pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Bapak ade kurniawan. SE sebagai Ketua Petugas Lalu Lintas Angkutan Laut Dan Usaha Kepelabuhanan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Selat Panjang yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengambilan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Ade juliansyah, kepala seksi perencanaan dan pembangunan dinas perhubungan kabupaten kepulauan meranti yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengambilan data sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Bapak Drs. Jazuli, kepala seksi angkutan. Dinas perhubungan kabupaten kepulauan meranti yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengambilan data sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan penulis dalam menuntut Ilmu di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau
12. Dan kepada seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah swt membalas budi baik dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis

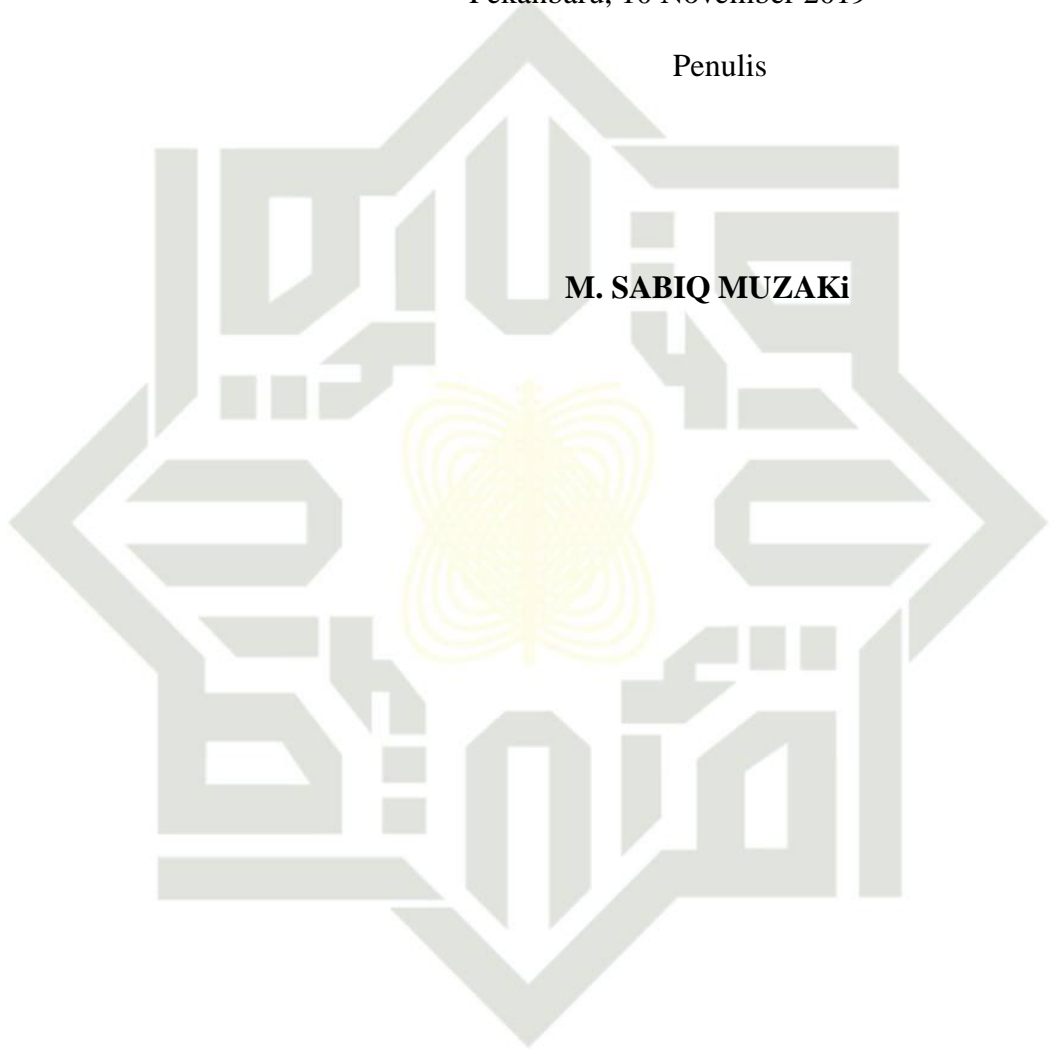
berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi pihak yang memerlukan dan menambah pengetahuan di bidang Ilmu Hukum.

*Wassalam.*

Pekanbaru, 10 November 2019

Penulis

**M. SABIQ MUZAKI**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>daftar tabel .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika penulisan.....	15
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran umum Kabupaten Kepulauan Meranti .....	17
1. Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti .....	17
2. Lokasi dan keadaan geografis.....	21
3. Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti.....	23
B. Gambaran umum Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang.....	25
1. Sejarah Kesyahbandaran.....	25
2. Tugas dan wewenang kantor kesyahbandaran.....	26
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Teori peran .....	29
B. Teori pengawasan .....	33
C. Tinjauan umum pelayaran.....	37
D. Tinjauan umum syahbandar.....	43



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV PEMBAHASAN

- A. Peran syahbandar melakukan pengawasan dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2017 studi di angkutan laut pelayaran-rakyat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan meranti.**Error! Bookmark not defined.**
- B. Faktor Penghambat Kantor Kesyahbandaran dan Oritas Pelabuhan Kelas IV Selat Panjang dalam menjalankan pengawasan Pelayaran Rakyat Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti**Error! Bookmark not defined.**

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	49
daftar pustaka .....	50



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi Dan Sampel.....	12
Tabel II.1 jumlah penduduk kecamatan tebing tinggi.....	22
Tabel III.1 Pos operasi pengawasan pelayaran.....	55
Tabel III. Tabel keterangan kepemilikan surat persetujuan berlayar .....	58
Tabel IV. Tabel perlengkapan dasar kapal pelayaran rakyat .....	60

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau kurang lebih 17.508,1 hal ini merupakan suatu anugerah dan tantangan terutama dalam penyediaan transportasi laut. Perkembangan jasa transportasi laut nasional sampai saat ini mengalami pasang dan surut seiring dengan pengaruh yang diakibatkan oleh perubahan kebijakan oleh pemerintah dan juga dari pemangku kepentingan dalam penyediaan transportasi laut.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara hukum mengatur mengenai pentingnya keselamatan warga negaranya yang terletak di dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berisi setiap negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan perwujudan wawasan nusantara perlu disusun sistem transportasi nasional yang efisien dan efektif, untuk menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, peningkatan mobilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang memadai dan dinamis serta mendukung pengembangan wilayah dan lebih mendukung perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, turut mendukung pertahanan dan keamanan, serta peningkatan hubungan internasional. Negara diharapkan mampu memberikan fasilitas pelayanan umum

<sup>1</sup> Tri Cahyadi, *Perlindungan Hukum Pelaut Di Kapal Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2017, h. 97





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang baik, dilakukan secara profesional mengingat bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Guna memberikan fasilitas pelayanan umum yang layak kepada masyarakat khususnya dibidang pelayaran, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berisi tentang peraturan mengenai pelayaran yang baik untuk menjamin keselamatan dan keamanan dalam melakukan pelayaran. Tentu dalam pelayaran diharapkan semua pihak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, oleh karena itu perlu adanya pengaturan-pengaturan.<sup>2</sup>

mengenai penjaminan keamanan dan keselamatan pelayaran hal ini juga diautur dalam Peraturan Menteri Perhubungan dalam pasal 1 angka 12 kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintah dipelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersil.<sup>3</sup>

Dalam peraturan menteri perhubungan No. 20 tahun 2015 tentang standar keselamatan pelayaran dalam pasal 207.<sup>4</sup> tentang kewajiban syahbandar melakukan fungsi keselamatan dan keamanan yang mencakup, pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum dibidang angkutan perairan, kepelabuhanan dan perlindungan lingkungan maritim dipelabuhan,

<sup>2</sup> Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 44

<sup>3</sup> Peraturan menteri perhubungan republik indonesia Nomor 51 tahun 2015

<sup>4</sup> Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum dibidang angkutan perairan, kepelabuhanan dan perlindungan maritime dipelabuhan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengangkutan melalui laut itu sebagian besar digunakan untuk mengangkut orang dan atau barang dari satu pulau ke pulau yang lain atau dari kota yang satu ke kota yang lain di suatu pulau atau dari Indonesia keluar negeri.<sup>5</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pengangkutan Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal. Sedangkan untuk pengangkutan perairan didalam negeri dilakukan oleh perusahaan pengangkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Penggunaan kapal berbendera indonesia oleh perusahaan angkutan laut nasional tersebut dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan asas untuk melindungi kedaulatan (*sovereignty*), mendukung perwujudan wawasan nusantara serta memberi kesempatan berusaha.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 32 bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan yang menyangkut terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhan dan lingkungan maritim. Kemudian dijelaskan lagi dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 34 yang berbunyi keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas tata susunan serta perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan

---

<sup>5</sup> Wiwoho Soedjono, *Hukum Laut Khusus Tentang pengangkutan Barang*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1986), h. 2

dan pengujian.<sup>6</sup> Untuk itu perlu dilakukan pengawasan dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran yang dilakukan oleh kesyahbandaran.

pengawasan secara keseluruhan merupakan aktivitas membandingkan antara hasil yang telah dilaksanakan dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam pengawasan diperlukan adanya acuan, standar, alat ukur terkait hasil yang ingin dicapai lantas bagaimanakah bentuk pengawasan syahbandar dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran terhadap pelayaran masyarakat yang masih tergolong tradisional.

Kelaik lautan kapal sangat erat kaitannya dengan keselamatan pelayaran. Kelaiklautan jika tidak dibantu dengan sarana keselamatan pelayaran akan meningkatkan resiko kecelakaan kapal, Kapal yang telah laiklaut dibuktikan dengan adanya Sertifikat Kelaiklautan kapal. . Di Indonesia yang menentukan kapal layak laut atau tidak adalah Biro Klasifikasi Indonesia, Syahbandar dan Direktorat Perkapalan pada Direktorat Jenderal di Perhubungan Laut.<sup>7</sup>

Pentingnya peran syahbandar dalam pengawasan kelaiklautan kapal dapat dilihat dalam Undang- undang pelayaran Indonesia mengenai keselamatan kapal. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian syahbandar dalam pengawasannya yaitu material kapal, konstruksi kapal, bangunan kapal, permesinan dan pelistrikan kapal, stabilitas kapal, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, dan elektronika kapal.

<sup>6</sup> Akhmad khairi, *Analisis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan. Kominikasi dan informatika dalam pengawasan alat penyebrangan kempang dikabupaten Kepulauan meranti* (Pekanbaru, Skripsi Uin Sultan Syarif Kasim , 2017), h. 7

<sup>7</sup> Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.262

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengguna jasa angkutan laut yang menggunakan kapal yang tidak laiklaut, dapat menimbulkan kerugian pada barang yang diangkut hingga kehilangan nyawa penumpang maupun awak kapal. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut maka diadakanlah pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan Syahbandar berupa:

- a. Pemeriksaan Tahunan, setiap 12 bulan diperiksa dalam keadaan dilimungkan di atas galangan kapal.
  - b. Pemeriksaan besar, dilakukan setiap 4 tahun sekali bersama dengan waktu dok tahunan.
  - c. Pemeriksaan kerusakan atau perbaikan dilakukan pada waktu terjadi sesuatu kerusakan yang mempengaruhi kesempurnaan kapal.
  - d. Pemeriksaan tambahan, dilakukan apabila diperlukan dispensasi misalnya akan mengangkut penumpang, membawa muatan berbahaya dan lain-lain.
- Kondisi laiklaut harus selalu dipertahankan antara lain, dengan perawatan oleh awak kapal sendiri terhadap bangunan kapal, mesin kapal, alat-alat keselamatan dan penolong lainnya sehingga semuanya dalam keadaan memungkinkan dan siap digunakan setiap waktu diperlukan.

Pasal 207 (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 menjelaskan bahwa seorang syahbandar juga ikut ambil bagian dalam pencarian maupun penyelamatan sebuah angkutan laut apabila angkutan laut tersebut mengalami kecelakaan ataupun gangguan pada saat melaksanakan kegiatan pelayaran.<sup>8</sup>

<sup>8</sup><https://media.neliti.com/media/publications/59543-ID-tugas-dan-tanggung-jawab>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten kepulauan meranti merupakan salah satu kabupaten yang memiliki beberapa pulau yang terpisah, wilayah tersebut menyebabkan transportasi laut (kapal) menjadi salah satu transportasi utama berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Pasal 6 Nomor 17 Tahun 2008 jenis angkutan di perairan terdiri atas: (a). angkutan laut (b). angkutan sungai dan danau (c). angkutan penyebrangan. Sesuai dengan Pasal 219 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008, untuk melakukan kegiatan pelayaran setiap angkutan laut atau kapal memerlukan surat persetujuan berlayar dan berlabuh yang dikeluarkan oleh syahbandar agar dapat berlayar atau berlabuh.

Transportasi terdiri dari transportasi darat, laut maupun udara. Dari ketiga jenis transportasi tersebut, transportasi laut masih banyak diminati oleh masyarakat untuk berpergian disamping biayanya lebih murah, transportasi laut juga bisa menjangkau ke daerah-daerah pelosok dan daerah-daerah yang dipisahkan oleh selat-selat atau laut yang tidak bisa ditempuh dengan menggunakan sarana pengangkutan darat maupun udara. Dalam melakukan pengangkutannya, transportasi laut melakukan pengangkutan terhadap orang (penumpang) dan pengangkutan terhadap barang. Pengangkutan akan sangat membantu dalam mengatasi isolasi yang timbul karena perbedaan letak geografis antar negara.<sup>9</sup>

“kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau jiwa manusia berupa kapal tenggelam,

---

<sup>9</sup> Tommy H. Purwaka, *Pelayaran Antar Pulau Indonesia Suatu Kajian Tentang Hubungan Antara Kebijakan Pemerintah Dengan Kualitas Pelayanan Pelayaran*, (Jakarta: Pusat Studi Wawasan Nusantara, 1993), h. 1

kapal terbakar, kapal tubrukan, dan kapal kandas.<sup>10</sup> Dan masalah keselamatan dan keamanan dalam pelayaran adalah merupakan tanggung jawab besar didalam kepelabuhan sebab persoalan yang terbesar dalam kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah persoalan kemampuan dan keahlian seseorang dalam menjalankan tugas kesyahbandaran.

Melihat pentingnya tugas Syahbandar disuatu pelabuhan untuk menunjang tertibnya administrasi pelayaran dan keselamatan pelayaran, maka tugas tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai disiplin dan kecakapan dibidang laut. Demikian juga untuk lingkungan pelabuhan kepulauan meranti, yang merupakan daerah dengan penduduknya yang heterogen, baik agama, suku maupun pencahariannya. Dengan keadaan yang kompleks ini, petugas Syahbandar haru benar-benar dapat menyelesaikan tugasnya dengan melihat situasi dan kondisi setempat. Apalagi pelabuhan dikabupaten kepulauan meranti merupakan daerah kepulauan dan banyak ditemukan pelabuhan penyebrangan orang dari satu pulau ke pulau lainnya.

Kepulauan meranti yang tentu saja memerlukan pengawasan yang baik dan administrasi yang tertib, agar tidak terjadi kecelakaan kapal. Pentingnya masalah keselamatan dan kemanan serta keseluruhan kegiatan dalam pelayaran angkutan laut merupakan tanggung jawab dalam kepelabuhan, sebab salah satu persoalan terbesar dalam kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah persoalan kemampuan dan keahlian seorang menjalankan tugas kesyahbandaranya dalam melaksanakan keseluruhan tugas dalam pelabuhan serta dalam melakukan kerja

<sup>10</sup> Undang-undang No 17 tahun 2008 Pasal 245

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sama ataupun hubungan dengan usaha lain yang bertugas melakukan pengawasan dalam perkapalan maupun dalam pelayaran itu sendiri.

Kebutuhan masyarakat kabupaten kepulauan meranti untuk menggunakan jasa penyebrangan antar pulau memang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karna belum adanya jembatan penghubung antar pulau untuk dilalui masyarakat, sehingga transportasi jalur laut sangat dibutuhkan dan diminati. Selain itu mobilitas masyarakat dengan tidak terhubungnya sejumlah jalan poros antar desa di masing-masing pulau juga menyebabkan angka penyebrangan menuju dan keluar selatpanjang menggunakan angkutan laut (kapal) terus meningkat.

Dalam menanggapi hal diatas upaya pemerintah kabupaten kepulauan meranti dalam melakukan pengawasan dan keselamatan maka pemerintahan kabupaten kepulauan meranti menetapkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti tepatnya pada Pasal 12 berkaitan dengan seksi keselamatan dan pengawasan. .

Angkutan laut atau kapal adalah “Kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik dan ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis. Sementara angkutan laut pelayaran rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar. Kapal layar bermotor dan/ atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu, pelayaran

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dilalukan oleh orang perseorangan atau berbadan usaha yang berkewarganegaraan Indonesia.<sup>11</sup>

Tentunya hal mengenai keselamatan dan keamanan dalam melakukan pelayaran itu tidak luput dari pengawasan oleh seorang syahbandar, pengertian pengawasan tersebut pada dasarnya kegiatan pengawasan dilaksanakan untuk mengetahui secara segera terkait penyimpangan, penyalahgunaan, pemborosan, maupun problematika organisasi yang lain, kemudian dilakukan langkah koreksi dan perbaikan terhadap permasalahan tersebut,

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai: **Peran Syahbandar Melakukan Pengawasan dalam Menjamin Keselamatan dan Keamanan Pelayaran berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015.**

## B . Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik persoalan, maka penulis akan membatasi masalah ini yakni berfokus kepada permasalahan pengawasan syahbandar dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran di kecamatan tebing tinggi kabupaten kepulauan meranti.

## C . Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah peran syahbandar melakukan pengawasan dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran berdasarkan Peraturan Menteri

<sup>11</sup> Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perhubungan Nomor 51 Tahun 2017 studi di angkutan laut pelayaran-rakyat kecamatan tebing tinggi kabupaten kepulauan meranti ?

2. Apakah faktor penghambat syahbandar dalam menjalankan fungsi pengawasan dan keamanan pelayaran terhadap pelayaran-rakyat di kecamatan tebing tinggi kabupaten kepulauan meranti ?

#### D . Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui peran syahbandar melakukan pengawasan dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran rakyat di kecamatan tebing tinggi.
  - b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pengahambat syahbandar dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayaran rakyat.
2. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah
  - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran syahbandar melakukan pengawasan dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015.
  - b. Untuk menambah bahan ataupun informasi data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian terhadap permasalahan yang sama.



- c. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program strata satu di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian.

- a. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum sosiologis dimana penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi mencari data yang diperlukan.<sup>12</sup>
- b. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.<sup>13</sup>

### 2. Lokasi penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di kantor syahbandar kabupaten kepulauan meranti yang terletak di Jalan Pelabuhan Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti adapun alasan penulis melakukan penelitian ini dikarenakan adanya ketidak sesuaian antara ketentuan undang-undang dan kenyataan di lapangan.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.14

<sup>13</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 25

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Populasi dan Sampel.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang-orang benda, kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama,<sup>14</sup> Sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili keseluruhan subjek penelitian yang mempermudah penelitian ini. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini ialah *proposive sampling*, yaitu mengambil jumlah sampel sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti dalam penelitian ini.

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Nama Populasi	Populasi	Sampel	Ket
1	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Petugas keselamatan berlayar penjagaan dan patrol</li> <li>b. Kepala Petugas Lalu Lintas Angkutan Laut Dan Usaha Kepelabuhanan</li> <li>c. Kepala Seksi Angkutan Dinas Pehubungan</li> </ol>	1 1 1	1 1 1	100% 100% 100%
2	Penyedia jasa penyebrangan laut pelayaran rakyat	8	8	100%
	<b>Jumlah</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h.121

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Data dan Sumber Data

Adapun data dalam penelitian ini adalah data yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer yaitu merupakan data atau keterangan yang diperoleh dari responden secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara berkaitan dengan peran peran syahbandar melakukan pengawasan dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor 51 tahun 2015.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang kami peroleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer seperti buku-buku tentang hukum, jurnal hukum dan peraturan-peraturan Peran kesyahbandaran.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primier dan skunder, misalnya, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa inggris, ensiklopedia dan lain-lain.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah:

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung bagaimana peran syahbandar dalam melakukan pengawasan terhadap pelayaran rakyat di kabupaten kepulauan meranti.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan responden dilapangan, yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti. selain itu Wawancara, juga merupakan situasi peran antara pribadi bertatap muka ketika seseorang , yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.<sup>15</sup>
- c. Studi Pustaka, yaitu mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan pelayaran , dan eksistensi lembaga otoritas pelabuhan atau syahbandar berdasarkan hukum dalam hirierki peraturan perundang-undangan di negara Indonesia.
- d. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian.

## 6. Metode Analisis Data.

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan semua, baik itu data sekunder, primer maupun tersier, lalu dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari masalah

<sup>15</sup> Amiruddin dan Zainal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 82



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokok yang diteliti dan data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahsan dengan uraian kalimat. Didalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan yaitu secara deduktif, prosedur deduktif ialah bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.<sup>16</sup>

#### F. Sistematika penulisan

Adapun sistematika penulisan dan pembahasan didalam skripsi ini ialah disusun berdasarkan sistematika yang terdiri dari lima Bab, yaitu :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

#### BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sejarah singkat kantor otoritas pelabuhan dan kesyahbandaran kabupaten kepulauan meranti, letak kantor otoritas pelabuhan dan kesyahbandaran kabupaten kepulauan meranti, serta struktur organisasi kantor otoritas pelabuhan dan kesyahbandaran kabupaten kepulauan meranti.

#### BAB III : TINJAUAN TEORI

Bab ini berisi tentang peran, kelembagaan, peraturan daerah, pengawasan dan pelayaran.

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.12

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang kajian hasil penelitian data dan pembahasan yang diperoleh dari lapangan selama penelitian berlangsung meliputi peran kantor otoritas pelabuhan dan kesyahbandaran kabupaten kepulauan meranti dalam melakukan pengawasan pelayaran rakyat di kecamatan tebing tinggi kabupaten kepulauan meranti, dan faktor-faktor yang menghambat dalam melaksanakan tugas kesahbandaran dalam melakukan pengawasan terhadap pelayaran rakyat.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi uraian hasil penelitian secara ringkas yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### Gambaran umum Kabupaten Kepulauan Meranti

##### 1. Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti

Pembentukan Kabupaten Meranti merupakan pemekaran dari kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009.

Tuntutan pemekaran kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kawedanan di Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari kabupaten Bengkalis.

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan dalam : <sup>17</sup>

1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juni 1999 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis

---

<http://news.merantikab.go.id/web/profil/sejarah> diakses tanggal 11 oktober 2019

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, Perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 tanggal 11 Juli 2008
4. Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a tanggal 9 Juni 2008 Perihal Dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti
5. Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 tanggal 8 September 2008 perihal Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti
6. Keputusan Gubernur Riau Nomor 1396/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan maka tanggal 19 Desember 2008 Pemerintah memutuskan dan menetapkan terbentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau. Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati. Dasar hukum berdirinya

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009. Dalam perkembangannya jumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 9 Kecamatan yang terdiri dari 101 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Rangsang dan Tebing Tinggi Barat dengan 14 desa/kelurahan dan Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terkecil adalah Kecamatan Tebing Tinggi dengan 9 desa/kelurahan.

**Tabel II.1**

**Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti**

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Jumlah
1	Tebing Tinggi Barat	-	14	14
2	Tebing Tinggi	4	5	9
3	Tebing Tinggi Timur	-	10	10
4	Rangsang	-	14	14
5	Rangsang Pesisir	-	11	11
6	Rangsang Barat	-	12	12
7	Merbau	1	9	10
8	Pulau Merbau	-	11	11
9	Tasik Putri Puyu	-	10	10
	Jumlah	5	96	101

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selama terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti ini sampai sekarang

yang pernah menjabat sebagai Bupati adalah sebagai berikut:

- a. Drs H. Syamsuar M. Si (2009-2010)
- b. Drs H. Irwan M. Si (2010 S/d sekarang)

#### 1. Visi

Menjadikan Kepulauan Meranti sebagai kawasan niaga yang maju dan unggul menuju masyarakat madani.

#### 2. Misi

- a. Mewujudkan penataan birokrasi pemerintahan yang efisien dan efektif.
- b. Menurunkan tingkat kemiskinan melalui swasembada hasil pertanian, perikanan dan peternakan.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi lokal.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas.
- e. Meningkatkan infrastruktur dasar dalam rangka merangkai pulau, termasuk revitalisasi air bersih dan peningkatan elektrifikasi.
- f. Mendorong investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan penciptaan nilai tambah ekonomi.
- g. Meningkatkan pembinaan mental spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlakul kharimah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Lokasi dan keadaan geografis

Kabupaten Kepulauan Meranti secara geografis terletak pada koordinat antara sekitar 0° 42' 30" - 1° 28' 0" LU, dan 102° 12' 0" -103° 10' 0" BT, dan terletak pada bagian pesisir Timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia- Malaysia dan secara tidak langsung, daerah ini menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun. Luas kabupaten Kepulauan Meranti mencapai 3714,19 km<sup>2</sup>, terdiri dari pulau-pulau dan lautan.

Batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Melaka dan Kabupaten Bengkalis.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelelawan.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

### 1. kependudukan

pengertian penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia,<sup>18</sup> Penduduk merupakan orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling

<sup>18</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indoneisa Tahun 1945 Pasal 6 Ayat 2

berinteraksi satu sama lain secara terus menerus. Salah satu ciri demografi di Indonesia adalah penyebaran penduduk tidak merata.

Penduduk juga merupakan objek dalam suatu pembangunan masyarakat dan mengingat itu dilaksanakan oleh penduduk dan perkembangan yang telah diikuti oleh tingkat kelahiran yang menyebabkan pertumbuhan penduduk di suatu tempat daerah menjadi semakin besar dan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi maka bisa berdampak pada kesulitan untuk mempertinggi kemakmuran pada masyarakat.

Berikut ini terdapat jumlah penduduk di kecamatan tebing tinggi pada tahun 2019 dalam bentuk tabel: **TABEL II.1**

No	Desa/Kelurahan	Luas(Km)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk(Penduduk /Km)
1	Sesap	8,3	522	63
2	Banglas barat	16,44	3606	219
3	Banglas	35,56	5236	147
4	Selat panjang timur	5,5	14943	2717
5	Selatpanjang selatan	1,5	8560	5707
6	Alah air	4,95	4945	999
7	Alah air timur	3,25	2943	906
8	Selatpanjang barat	1	5306	5306
9	Selatpanjang kota	4,5	10805	2401
	<b>Tebing tinggi</b>	<b>81</b>	<b>56866</b>	<b>702</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat dilihat table diatas tingkat lependudukan terpadat berada di wilayah Kelurahan selatpanjang timur dengan angka kependudukan 14,943 dengan luas wilayah 5,5 kilo meter.

## 2. Agama dan kepercayaan

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar bagi manusia. Kebebasan beragama di Negara Kesatuan Republik Indonesia dijamin dalam batang tubuh UUD 1945 pada pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan tidak mencampur adukkan kepercayaan. Salah satu caranya adalah dengan membangun sarana dan prasarana ibadah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mayoritas Penduduk beragama Islam.

## 3. Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti

Sebagai tindak lanjut undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dimana penyelenggaraan otonomi daerah adalah pelimpahan kekuasaan pemerintah, pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri, atas dasar itu pula Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti membentuk dinas perhubungan dengan peraturan daerah nomor 02 tahun 2011 tanggal 13 januari 2011.

Dinas perhubungan kepulauan merati mempunyai tugas dan melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 88 tahun 2018 untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang perhubungan memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategis bagi pembangunan mengingat sifatnya sebagai penggerak dan pendorong kegiatan pembangunan serta perekat kesenjangan antar wilayah.

Tugas dan wewenang dinas perhubungan keperluan meranti dibidang angkutan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana.
- b. Fungsi
  - 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
  - 2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
  - 3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
  - 4) melakukan pertimbangan teknis dalam penerbitan perizinan angkutan;
  - 5) melaksanakan tertib administrasi dan menyusun program dan kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya;
  - 6) pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

<sup>19</sup> Peraturan bupati nomor 88 tahun 2018

## B. Gambaran umum Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang

### 1. Sejarah Kesyahbandaran

Sekitar abad 16 di nusantara telah dikenal kedudukan syahbandar yang berada pada setiap pelabuhan yang bertugas mengunjungi kapal sandar dan mengawasi kegiatan perdagangan di sekitar area pelabuhan, pergudangan, dan pasar. Para syahbandar ini juga bertugas menaksir berapa harga barang dagang dan menentukan pula berapa besar biaya pajak yang dikenakan pada suatu barang dagangan,

Para syahbandar merupakan kepercayaan para raja dalam menerima bea masuk dan bea keluar dari barang-barang yang diperdagangkan dipelabuhan, tercatat pada masa itu beberapa kerajaan yang telah memiliki syahbandar diantaranya kerajaan aceh masa kejayaan sultan iskandar muda, dan kerajaan demak yang memiliki pelabuhan jepara.

Demikian halnya pelabuhan-pelabuhan seperti malaka, banten, tuban, gresik Martapura, Banjarmasin, Makassar, dan pelabuhan lainnya peransyahbandar yang memungut bea masuk dan keluar telah dikenal dalam kegiatan perdagangan, apapun namanya pungutan-pungutan yang telah ada pada masa kerajaan itu adalah bentuk awal dari pelaksanaan kegiatan kebeacukaan di Indonesia.<sup>20</sup>

---

<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-syahbandar>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Tugas dan wewenang kantor kesyahbandaran

Dalam peraturan menteri perhubungan pasal 1 angka 12, kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan adalah lembaga pemerintahan dipelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengwasan dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintah dipelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersil.<sup>21</sup>

Dan sesuai menurut tugas syahbandar yang ditentukan berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor: KM 64 tahun 2010 yakni “mengoordinasikan dan melaksanakan keselamatan dan keamanan pelayaran” maka syahbandar melaksanakan inpeksi atas kapal-kapal yang datang, meliputi pemeriksaan dan pengujian kondisi fisik bangunan kapal, serta dokumen surat-surat dan sertifikat kapal.<sup>22</sup>

Selanjutnya pengaturan mengenai Tugas Syahbandar dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan seperti yang dimaksud di atas:<sup>23</sup>

1. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan.
2. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran
3. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan.
4. Mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air.

<sup>21</sup>peraturan menteri perhubungan republic Indonesia nomor 51 tahun 2015

<sup>22</sup>Lasse, *manajemen bisnis transportasi laut, carter dan klaim*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada ,2015), h.257.

<sup>23</sup>undang-undang nomor 17 tahun 2008 pasal 208.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mengawasi kegiatan penundaan kapal.
6. Mengawasi pemanduan.
7. Mengawasi kegiatan bongkar muat barang berbahaya serta limbah berbahaya dan beracun.
8. Mengawasi pengisian bahan bakar.
9. Mengawasi kegiatan embarkasi dan debarkasi.
10. penumpang Mengawasi pengerukan dan reklamasi.
11. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan.
12. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan.
13. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.
14. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2018

Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV, terdiri atas:

- a. Petugas tata usaha
- b. Petugas status hukum dan verifikasi kapal
- c. Petugas keselamatan berlayar, penjagaan dan patrol
- d. Petugas lalu lintas dan angkutan laut, dan usahakepelabuhanan.

## 2. Susunan organisasi KSOP Kelas Iv Selatpanjang

**PELAKSANA TUGAS KANTOR  
KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS  
PELABUHAN KELAS IV SELATPANJANG  
MOH.FAISAL,SE,MM  
NIP.19731102 1992031 001**

PETUGAS TATA USAHA  
KHARLI RAMA, A.Md  
NIP.19860513 200812 1 004

KEPEGAWAIAN DAN UMUM  
JOHAN TRI EFENDI  
NIP. 19871022 201012 1 007

KEUANGAN/ INVENTARIS BMN  
1. SELA SAVIANA NIP. 19910729 201012 2002  
2. NOFRIADI NIP. 19761108 199903 1 003  
3. KARMILAWATI NIP. 19790711 200212 2 002

PETUGAS STATUS  
HUKUM DAN  
SERTIFIKASI KAPAL  
HELMI NOFIKRI, SH  
NIP.198207212001121004

PETUGAS KESELAMATAN  
BERLAYAR,  
PENJAGAAN DAN PATROLI  
SUHARTO  
NIP. 19660911 1992031 002

PETUGAS LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT  
DAN USAHA KEPELABUHANAN  
ADE KURNIAWAN, SE  
NIP. 19810714 200502 1 002

PELAKSANA ADMINISTRASI  
WILAYAH KERJA TJ.SAMAK:  
1. MUKLIS EFENDI NIP. 19681116 199103 1 002  
2. HAPRIANTO NIP. 19820504 20081 2 1001

WILAYAH KERJA TANJUNG KEDABU:  
1. SALOMO NATAL NIP. 19841225 200502 1 001

POS KESYAHBANDARAN SEL JULING  
1. YUWANDRI YASRIE NIP.19840310 200712 1 001  
2. FIRMAN MUHARIA NIP.19890620 200712 1 001

NAUTIS TEKNIS/PELAKSANA ADM  
1. NORMAN NIP.19720928 199203 1 001  
2. SYAHRIL NIP.19690401 199703 1 002

NAHKODA KAPAL KELAS V  
1. DEDI M. NIP.19771206 200712 1 001

PELAKSANA OPERASIONAL:  
1. NAWAWI NIP.19770202 200604 1 002  
2. JULFRI A. NIP.19810720 200604 1 003  
3. RUZianto NIP.19800825 200312 1 004  
4. HANAFI NIP.19730216 199203 1 001  
5. SUTRISNO NIP. 19760420 200712 1 002

**KELMPOK  
JABATAN  
FUNGSIONAL**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A . Teori peran

Makna dari kata “peran” dapat dijelaskan lewat beberapa cara. **pertama**, suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakterisasi yang disbanding untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam pentas drama.

**Kedua**, suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakter (posisi) dalam struktur sosial.

**Ketiga**, suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu “penampilan atau unjuk peran” (*role performance*).<sup>24</sup>

Paham yang digunakan dalam mengkaji teori peran ini adalah paham strukturalis dan paham interaksionis. Paham yang pertama lebih mengaitkan antara peran-peran sebagai unit kultural serta mengacu keperangkat hak dan kewajiban, yang secara normative telah dicanangkan oleh sistem budaya. Sistem budaya tersebut menyediakan suatu sistem posisional, yang menunjuk pada suatu unit dari struktur sosial, yaitu suatu “*location in system of social relationship*”. Pada

<sup>24</sup>Edi Suhardono, *Teori Peran: Konsep, Deriasi dan Impilkasinya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2016), h. 3

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

intinya, konsep struktur menunjukkan suatu konotasi pasif-statis, baik pada aspek permanensi, maupun aspek saling kait antara posisi satu dan lainnya.<sup>25</sup>

Peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya<sup>26</sup>

Pengertian peranan menurut Mason Gross yaitu sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.<sup>27</sup> Harapan tersebut merupakan imbalan dari norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan peranan ditentukan oleh norma dalam masyarakat.

Stryker membangun teori peran dengan menggunakan beberapa prinsip umum sebagai berikut:

1. Tindakan manusia (aktor) tergantung pada dunia yang telah dinamai dan diklasifikasi. Melalui interaksi dengan orang-orang lain, aktor mempelajari bagaimana menggolong-golongkan dunia dan bagaimana cara mereka bertindak terhadap dunia.
2. Actor mempelajari symbol-simbol yang digunakan untuk menentukan posisi sosial dalam pengertian structural, ada komponen morfologis dari struktur sosial yang relatif stabil. Tetapi peran juga penting sebagai perilaku bersama yang dihubungkan dengan posisi sosial.

<sup>25</sup> Ibid, h. 4

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 245

<sup>27</sup> David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, (Jakarta: CV. Raja Wali, 2009), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Struktur sosial berskala luas (yang merupakan pola perilaku yang terorganisasi) menempati kedudukan yang penting, struktur sosial merupakan kerangka tempat para aktor bertindak
4. Ketika aktor bertindak dalam struktur sosial tersebut, mereka berperilaku dan memosisi dirinya sendiri dalam struktur tersebut.
5. Ketika aktor berinteraksi, dia mendefinisikan situasi dengan mengaplikasi nama-nama terhadapnya, terhadap peserta, terhadap dirinya sendiri, dan terhadap ciri-ciri khusus dari situasi. Penetapan situasi ini kemudian digunakan oleh aktor untuk mengorganisasi perilaku dirinya sendiri.
6. Perilaku sosial tidak ditentukan oleh makna sosial tersebut, meskipun ada paksaan dari makna sosial tersebut. yang berlaku adalah *teori role making* dimana aktor tidak semata-mata menerima saja suatu peran, melainkan mereka berperan aktif dan kreatif terhadap peran mereka.
7. Struktur sosial juga membatasi hingga ditingkat mana suatu peran boleh diciptakan. Jika bukan hanya menerima begitu saja peran tersebut. Ada struktur sosial tertentu yang memungkinkan aktor lebih kreatif, tetapi ada juga sebaliknya.<sup>28</sup>

Istilah “peranan” (role) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku di dalam masyarakat dimana dia hidup. Tambahan pula, dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan, seperti aktor-aktor profesional tertentu yang muncul dalam satu peranan pada

<sup>28</sup> Munif fuady, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cetakan Pertama, h. 301-302



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertunjukan pagi dalam pertunjukan sore, nasih lagi dalam suatu peranan lain dalam televisi pagi. Perbedaan yang besar dari peranan seseorang aktor profesional adalah bahwa peranan sosial seseorang tidaklah didefinisikan setajam itu. Bilamana seorang individu menerima dari satu peranan sosialnya, dia tidaklah dipimpin, sebagai seorang aktor, oleh naskah yang diikutinya. Sebagai gantinya, dia sebagian besar harus membuat improvisasi sebagaimana aktor didalam komedi italia yang tradisional.<sup>29</sup>

Pentingnya peranan, karena ia mengatur perilaku seseorang meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

Dalam hubungan ini peranan menyangkut tiga hal yaitu:<sup>30</sup>

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau organisasi.
3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

Maksud konsep peranan adalah untuk membuat garis batas antara masyarakat dan individu. Dalam batas peranan sosialnya, seseorang mempunyai batas peranan sosialnya, seseorang mempunyai batas tertentu. Sebagaimana kita

<sup>29</sup> Maurice Duverger Penerjemah, Daniel Dhakidae, *Sosiologi Politik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cetakan Kesepuluh, h. 105

<sup>30</sup> Soerjono Soekarto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006), h. 270

telah tunjukan, dia tidak mengikuti naskah tertulis, akan tetapi hanya garis petunjuk umum.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap perorangan ataupun kelompok yang dalam hal ini adalah syahbandar telah menjalankan perannya sesuai dengan norma-norma yang dihubungkan dengan fungsi pengawasan dalam keselamatan dan keamanan pelayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan. dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat, dalam hal ini penulis merujuk kepada norma hukum berupa undang-undang, peraturan menteri dan peraturan daerah yang apabila peranan ini dijalankan oleh kesyahbandaran akan tercipta suatu fungsi pengawasan terhadap pelayaran yang diselenggarakan guna terciptanya keamanan bagi masyarakat dan jaminan keselamatan bagi pengguna jasa pelayaran nantinya.

## B . Teori pengawasan

Istilah mengenai pengertian pengawasan menurut bahasa Indonesia berasal dari kata “awas” dimana berarti pengawasan adalah aktifitas mengawasi atau mengamati sesuatu dengan teliti. Aktifitas lanjutan dari pengawasan adalah melaporkan hasil pengawasan tersebut. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut dan proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Adisasmita Raharjo, *Manajemen Pemerintah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h.15



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Winardi pengawasan adalah semua aktifitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan, sedangkan menurut Basu Swasta pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberi hasil seperti yang diinginkan sedangkan menurut komarudin pengawasan adalah hubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.<sup>32</sup>

Menurut hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan. Hasil pengawasan itu harus dapat menunjukkan sampai mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata klola pemeerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek pentig untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagai mana mestinya, dalam konteks ini pengawasan terjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri.<sup>33</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan akan berjalan dengan baik. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk

<sup>32</sup>Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 16

<sup>33</sup>*Ibid*, h, 17



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.<sup>34</sup>

#### a. Prinsip Pengawasan

Bahwa pada prinsipnya pengawasan itu penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas dalam suatu organisasi, baik organisasi usaha maupun organisasi pemerintah, sehingga pengawasan tersebut diadakan dengan maksud untuk yaitu sebagai berikut :<sup>35</sup>

- 1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
- 2) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan dan mengetahui hasil kerja sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam planing atau tidak.

<sup>34</sup> Mufham Al-Amin, *Manajemen Pengawasan*, (Jakarta: Kalam Indonesia, 2006), h.15

<sup>35</sup> *Ibid*, h.18

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Mengetahui hasil pekerja dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planing.

b. Tujuan Pengawasan

Menurut ranupandojo, tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. sedangkan soekarno dan gouzali saydam mengemukakan tujuan pengawasan antara lain sebagai berikut.<sup>36</sup>

1. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana.
2. Untuk mengetahui suatu kegiatan sudah sesuai dengan intruksi.
3. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien.
4. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan.
5. Untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan.

Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang dikerjakan menjadi kenyataan.

c. Fungsi Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi lancarnya kegiatan suatu organisasi. Pengawasan bisa menjadi fungsi pengendali bagi manajemen untuk memastikan bahwa rencana-

---

<sup>36</sup> *Op.cit.* h. 23

rencana yang mereka telah tetapkan dapat berjalan secara mulus dan lancar sehingga organisasi bisa mencapai setiap sasaran yang telah ditetapkan.

Fungsi pengawasan yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi tentang pentingnya disiplin, mematuhi segala peraturan demi keselamatan kerja bersama, sosialisasi perlu di perlukan terus menerus, karena usaha pencegahan sangat penting mendapat perhatian.

Jadi fungsi pengawasan adalah untuk memberikan analisi, menilai, merekomendasikan, dan menyampaikan hasil lapoeran sehubungan dengan bidang pekerjaan organisasi yang telah diteliti.<sup>37</sup>

### C. Tinjauan umum pelayaran

#### 1.pengertian pelayaran

Berbicara tentang pelayaran dalam arti luas, tidak bisa terlepas dari aspek angkutan di perairan (dalam arti kapal), aspek kepelabuhanan, serta aspek keamanan dan keselamatannya, sedangkan pelayaran dalam arti sempit hanya menyangkut pada aspek angkutannya saja<sup>38</sup>.

Sebagai suatu bentuk kegiatan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka dunia pelayaran memerlukan regulasi yang mengatur mengenai usaha pelayaran karena Indonesia adalah negara hukum dan segala sesuatu harus diatur dalam Undang-undang. Maka untuk mengatur itu semua Pemerintah melahirkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Sebagai hukum positif, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tersebut mengatur hal-hal yang

<sup>37</sup> Ibid, h. 19

<sup>38</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Dagang, Hukum Pelayaran Laut dan Pelayaran Darat*, (Bandung: 1983), h. 23





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didalamnya terdapat faktor-faktor penting transportasi di perairan. Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa pelayaran satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan yang maritim.<sup>39</sup>

Pelayaran atau dapat dikatakan juga sebagai angkutan perairan telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 10 UU NO 17 tahun 2008 tentang pelayaran, angkutan adalah angkutan barang dari suatu tempat diterimanya barang tersebut ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang yang bersangkutan, sedangkan pengangkutan adalah kegiatan memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ketempat lain dengan selamat sampai tujuan.

Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa keduanya merupakan suatu proses, hanya saja didalam suatu angkutan sudah saja hal yang detail dimana perpindahan itu diakhiri. Dalam arti sudah di tentukan tempat penerimaan barang dan penyerahan barang.

Dikatakan *pengangkutan perairan karena dalam kegiatan pengangkutanya dilakukan dengan melalui perairan, hanya saja jenis perairanya berbeda-beda. Angkutan diperairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.*<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 1

<sup>40</sup> Zainal Assikin "Hukum Dagang", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2013, h.198

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayaran diselenggarakan tentu harus memberi manfaat kepada semua pihak, dalam melakukan kegiatan usaha di bidang pelayaran menggunakan persaingan yang sehat, dan juga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.<sup>41</sup>

Tujuan penyelenggaraan kegiatan pelayaran juga telah tercantum dalam undang-undang sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a) Memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional.
- b) Membina jiwa kebahaarian.
- c) Menjunjung kedaulatan negara.
- d) Menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional.
- e) Menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional.
- f) Memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangkaperwujudan wawasan nusantara.

### 2. Jenis pelayaran

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, angkutan di perairan terdiri atas: Angkutan Laut, Angkutan Sungai dan Danau, dan Angkutan Penyeberangan.<sup>43</sup>

<sup>41</sup>Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 144

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 3

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 199

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a) Angkutan Laut

Angkutan laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.

#### b) Angkutan Sungai dan Danau

Angkutan sungai, danau dan penyeberangan merupakan istilah yang terdiri dari dua aspek yaitu Angkutan Sungai Dan Danau (ASD). Istilah ASD ini merujuk pada sebuah jenis moda atau jenis angkutan dimana suatu sistem transportasi terdiri dari 5 macam yaitu moda angkutan darat (jalan raya), moda angkutan udara, moda angkutan kereta api, moda angkutan pipa (yang mungkin belum dikenal luas), moda angkutan laut dan moda ASD dan Penyebrangan.

Angkutan perairan daratan atau angkutan perairan pedalaman merupakan istilah lain dari Angkutan Sungai dan Danau (ASD). Jenis angkutan ini telah lama dikenal oleh manusia bahkan terbilang tradisional. Sebelum menggunakan angkutan jalan dengan mengendarai hewan seperti kuda dan sapi, manusia telah memanfaatkan sungai untuk menempuh perjalanan jarak jauh. Demikian juga di Indonesia, sungai merupakan wilayah favorit sehingga banyak sekali pusat pemukiman, ekonomi, budaya maupun kota-kota besar yang berada di tepian sungai seperti Palembang.<sup>44</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, terutama pada Pasal 1, dijelaskan bahwa angkutan perairan daratan yang juga dikenal sebagai angkutan sungai dan danau (ASD)

---

<sup>44</sup> *Op.cit*,



adalah meliputi angkutan di waduk, rawa, banjir, kanal, dan terusan. Di Indonesia, angkutan perairan daratan merupakan bagian dari sub sistem perhubungan darat dalam sistem transportasi nasional.

### c) Angkutan Penyebrangan

Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan kereta api yang terputus karena adanya perairan. Dalam bahasa Inggris, moda ini dikenal dengan istilah ferry transport.<sup>45</sup> Selain yang telah disebutkan di atas, masih ada jenis jenis angkutan laut berdasarkan Pasal 7 UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Angkutan Laut Dalam Negeri, Angkutan Laut Luar Negeri, Angkutan Laut Khusus, dan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat.

### 3. jenis-jenis kapal

Menurut Dep.Dik.Nas (2003), jenis kapal menurut fungsinya adalah :

#### 1. Kapal Pesiar,

Adalah kapal yang dipakai untuk pelayaran pesiar. Penumpang menaiki kapal pesiar untuk menikmati waktu yang dihabiskandiatas kapal yang dilengkapi fasilitas penginapan dan perlengkapan bagaikan hotel berbintang. Lama pelayaran pesiar bisa berbeda-beda,mulai dari beberapa hari sampai sekitar tiga bulan tidak kembali kepelabuhan asal keberangkatan.

---

<sup>45</sup> *Op.cit.* h.200



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2. Kapal Riset

Adalah kapal yang pada umumnya digunakan untuk riset dan penelitian yang berhubungan dengan kelautan. Seperti penelitian gempa bawah laut, pencemaran air laut.

#### 3. Kapal Penumpang

Adalah kapal yang digunakan untuk angkutan penumpang. Untuk meningkatkan efisiensi atau melayani keperluan yang lebih luas, kenyamanan dan kemewahan, kadang kapal diperlukan demi memuaskan para penumpang. Lain dari itu kapal penumpang harus memiliki kemampuan bertahan hidup pada situasi darurat.

#### 4. Kapal Ro-Ro

Adalah kapal yang bisa memuat orang dan kendaraan yang berjalan masuk sendiri ke dalam kapal dengan penggeraknya sendiri dan bisa keluar dengan sendiri juga sehingga disebut sebagai kapal roll on roll off disingkat Ro-Ro, untuk kapal dilengkapi dengan pintu rampa yang menghubungkan kapal dengan dermaga.

#### 5. Kapal Barang atau kapal kargo

Adalah segala jenis kapal yang membawa barang-barang dan kargo dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Ribuan kapal jenis ini menyusuri laut dan samudera dunia setiap tahunnya memuat barang-barang perdagangan internasional dan nasional. Kapal kargo pada umumnya di desain khusus untuk tugasnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 6. Kapal Tanker

Adalah kapal yang dirancang untuk mengangkut minyak atau produk turunannya. Jenis utama kapal tanker termasuk mengangkut minyak, LNG, LPG. Diantara berbagai jenis kapal tanker menurut kapasitas : ULCC (Ultra large Crude Carrier) berkapasitas 500.000 Ton dan VLCC (*Very Large Crude Carrier*) berkapasitas 300.000 Ton.g.

#### 7. Kapal Tunda

adalah kapal yang dapat digunakan untuk melakukan manuver/pergerakan, utamanya menarik atau mendorong kapal lainnya dipelabuhan, laut lepas atau melalui sungai atau terusan, Kapal Tunda memiliki tenaga yang besar bila dibandingkan dengan ukurannya. Mesin induk kapal tunda biasanya berkekuatan antara 750 sampai dengan 300 tenaga kuda (500 s/d 2000 kW), tetapi kapal yang lebih besar (digunakan dilaut lepas) dapat berkekuatan 25.000 tenaga kuda (20.000 kW). Kapal tunda memiliki kemampuan manuver yang tinggi, tergantung dari unit penggerak. Kapal tunda dengan penggerak konvensional memiliki baling-baling di belakang, efisien untuk menarik kapal dari pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

#### D . Tinjauan umum syahbandar.

pengertian syahbandar

kata syahbandar menurut etimologisnya terdiri dari kata *syah* dan *Bandar*,

*syah* berarti penguasa dan kata *Bandar* berarti pelabuhan-pelabuhan dan sungai-sungai yang digunakan sebagai tempat labuh, tempat-tempat kapal pada jembatan-tanggah dan jembatan-jembatan muat, dermaga-dermaga dan cerocok-cerocok





dan tempat-kepil yang lazim digunakan oleh kapal kapal, juga daerah laut yang dimaksudkan sebagai tempat-tempat kepil kapal-kapal yang karena syarat atau sebab-sebab lain. Tidak dapat masuk dalam batas-batas tempat kepil yang lazim digunakan.<sup>46</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, syahbandar adalah pegawai negeri yang mengepalai urusan pelabuhan, kepala pelabuhan. Dalam bahasa inggris biasa disebut *harbour master*.

secara hukum, syahbandar diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaaran nomor dan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2009, syahbandar adalah pejabat pemerintah yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan kermanan pelayaran.

Dalam peraturan menteri perhubungan nomor 36 tahun 2012 organisasi dan tatakerja kantor syahbandar dan otoritas pelabuhan dijelaskan dalam pasal 1, kantor syahbandar dan otoritas pelabuhan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan kementerian perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur jendral perhubungan laut.

Peraturan menteri perhubungan republik Indonesia nomor 51 tahun 2015 dalam pasal 1 angka 12 esyahbandaran dan otoritas pelabuhan adalah lembaga

<sup>46</sup> Randy y.c aguw, *tanggung jawab syahbandar dalam keselamatan pelayaran dirinjau dari undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran* jurnal lex administratum, volume.1 nomor 1 2013 h. 47

pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

#### Tugas dan fungsi kesyahbandaran

Kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan dipelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersil.

Kantor kesyahbandaran mempunyai fungsi sebagai berikut :<sup>47</sup>

- a. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal.
  - b. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal.
  - c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan perlayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, yertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal serta penerbitan surat persetujuan berlayar.
- Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran diperairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan

---

<sup>47</sup>Peraturan menteri nomor 36 tahun 2012

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan lingkungan maritime dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan dipelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pelaksanaan penyusunan rencana induk pelabuhan, daerah lingkungna kerja kepentingan pelabuhan, serta pengawasan penggunaanya, pengusulan tariff untuk ditetapkan menteri.

Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta sarana bantu navigasi pelayaran.

- h. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan.

Pelaksanaan peraturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada badan usaha pelabuhanan.

Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan. Dan

Pelaksanaan urusan keuangan, kepegaiwaian dan umum hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

Dasar hukum syahbandar

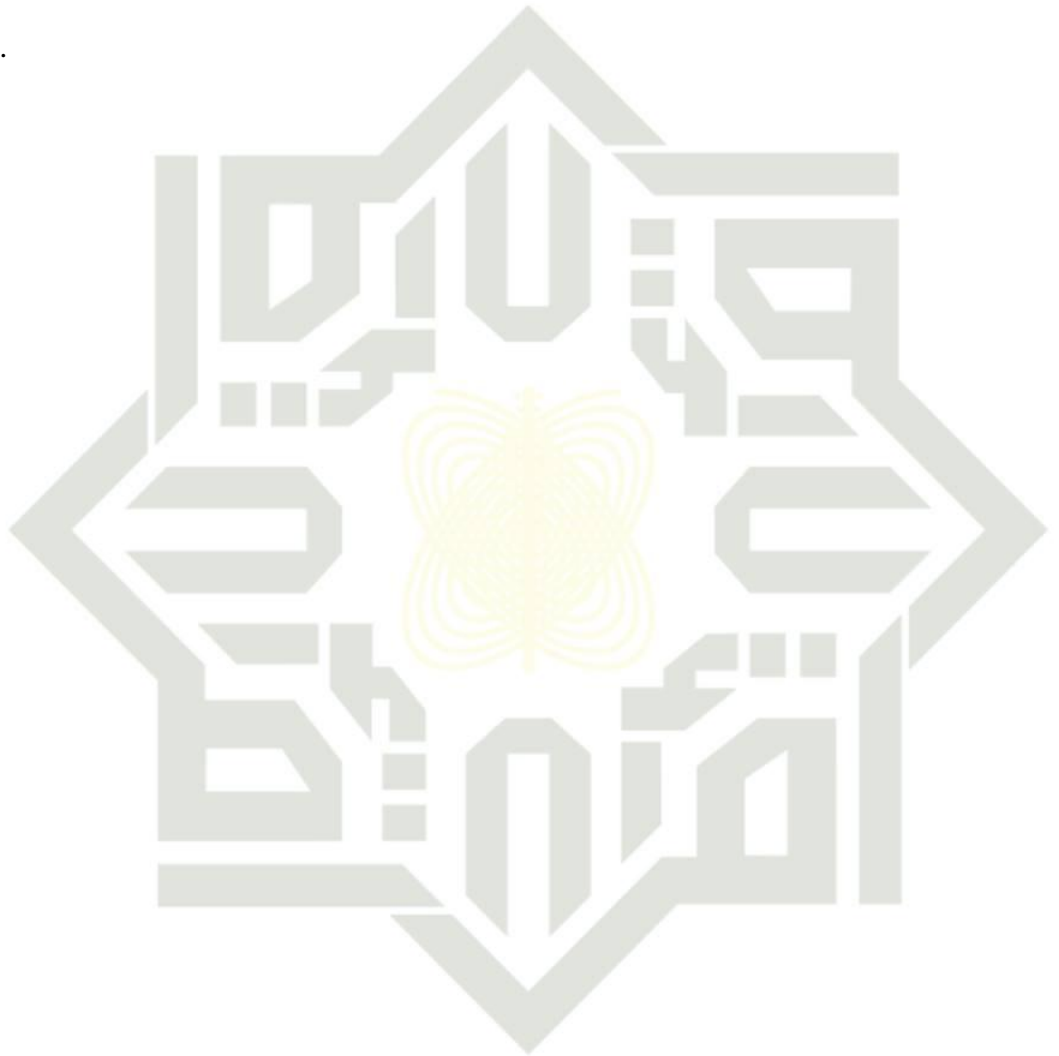
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.



Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

Peraturan menteri perhubungan nomor 36 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan.

Peraturaturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pelabuhan.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A . Kesimpulan

dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa :

Peran syahbandar melakukan pengawasan guna menjamin keselamatan dan keamanan dalam pelayaran rakyat dikecamatan tebing tinggi barat kabupaten kepulauan meranti berdasarkan peraturan menteri nomor 51 tahun 2015 dan juga dijelaskan di undang-undang nomor 17 tahun 2008 tepatnya pada pasal 207. Pengawasan terhadap pelayaran rakyat sebagai usaha rakyat yang masih bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh syahbandar dinilai kurang optimal dengan ditemukannya beberapa faktor seperti, para pengusaha angkutan pelayaran rakyat yang masih belum memiliki surat persetujuan berlayar yang merupakan dokumen negara dikeluarkan oleh syahbandar dan salah satu upaya proses pengawasan itu sendiri.

Faktor kendala dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh syahbandar terhadap pelayaran rakyat adalah petugas pengawasan yang belum mampu mencangkup seluruh objek pengawasan dikarenakan personel yang terbatas, kurangnya kesadaran para pemilik usaha pelayaran rakyat terhadap perlengkapan kapal guna keselamatan dan kermanan penumpang dan karakter sosial dan budaya masyarakat yang kurang memperhatikan keselamatan terhadap diri mereka sendiri.

## B. Saran

1. Perlunya peningkatan daya pengawasan dan pemahaman tentang kelaiklautan kapal secara langsung yang dilakukan oleh pihak syahbandar kepada pemilik usaha pelayara rakyat. Guna meminimalisir kapal-kapal yang tidak sesuai standar berlayar, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Perlunya ketegasan syahbandar kepada para pemilik usaha kapal pelayaran rakyat yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar dan perlengkapan saranan dan prasana yang mendukung terhadap keamanan dan keselamatan penumpang, serta komunikasi yang baik antara pihak syahbandar dan pemilik usaha pelayaran.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- At-Amin, Mufham, *Manajemen Pengawasan*, Jakarta: Kalam Indonesia, 2006
- Amiruddin dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Assikin, Zainal, *Hukum Dagang*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 2013
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Berry, David, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Jakarta: CV. Raja Wali, 2009
- Fuady, Munif, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana, 2011
- Lasse, *Manajemen Bisnis Tranportasi Laut, Carter dan Klaim*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada ,2015
- Maurice Duverger penerjemah, Daniel Dhakidae, *Sosiologi Politik*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Naryanto. *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Pojodikoro, Wirjono, *Hukum Dagang, Hukum Pelayaran Laut dan Pelayaran Darat*, Bandung: 1983
- Raharjo, Adisasmita, *Manajemen Pemerintah*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2011
- Salim, abbas, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Soekarto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soedjono, Wiwoho. *Hukum Laut Khusus Tentang pengangkutan Barang*, Yogyakarta: Penerbit Liberty

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Soekanto, Soerjono, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002

Suhardono, Edi, *Teori Peran: Konsep, Deriasi dan Impilkasinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016

Suadi, Amran, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan DiIndonesia*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014

Tommy H. Purwaka, *Pela yaran Antar Pulau Indonesia Suatu Kajian Tentang Hubungan Antara Kebijaksanaan Pemerintah Dengan Kualitas Pelayanan Pelayaran*, Jakarta: Pusat Studi Wawasan Nusantara, 1993

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Yanto, Nur, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014

Hasyimzoem, Yusrani dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017

#### B. Jurnal

Cahyadi, Tri. 2017. *Perlindungan hukum pelaut di kapal indonesia berbasis nilai keadilan*, Jurnal pembaharuan hukum

Edward Mandala,Rendra Setyadiharja 2016, *Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 2

Skripsi, Khairi Akhmad, 2017, “*Analisis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan. Kominikasi dan informatika dalam pengawasan alat penyebrangan kempang dikabupaten kepulauan meranti*, Pekanbaru: Skripsi Uin Sultan Syarif Kasim

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soenhaji, *Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar*,: Journal Administrative Law Dan Governance, Vol 1 Edisi 3 Agustus 2018

Penda Bisma Bayuputra, Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 3/Apr/2015

#### Internet

<https://media.neliti.com/media/publications/59543-ID-tugas-dan-tanggung-jawab-syahbandar-dala.pdf>

<http://news.merantikab.go.id/web/profil/sejarah> diakses tanggal 11 oktober 2019, (jam 21.00)

<https://www.goriau.com/berita/baca/sebanyak-726-warga-kepulauan-merant-siap-terjun-menjadi-pekerja-maritim-profesional.html>, Kamis 26 Desember 2019

#### D. Peraturan Perundang-Perundangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran  
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.

Peraturan Menteri Perhubungan Republic Indonesia Nomor 51 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
 Email : dpmtsp@riau.go.id Kode Pos : 28126

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/27447  
 TENTANG



032010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8219/2019 Tanggal 15 Oktober 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

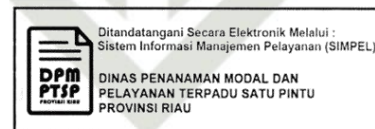
- |                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : | M. SABIQ MUZAKI                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. NIM / KTP         | : | 11527103117                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. Jenjang           | : | S1                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6. Judul Penelitian  | : | PERAN SYAHBANDAR MELAKUKAN PENGAWASAN DALAM MENJAMIN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 51 TAHUN 2015 (STUDI DI ANGKUTAN PELAYARAN-RAKYAT KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV SELAT PANJANG<br>2. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI                                                                                                                     |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 4 November 2019



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN  
KELAS IV SELATPANJANG**

Jalan Pelabuhan No. 2 Telp. : 0763 - 31134 TGM : -  
Selatpanjang - 28753 E-Mail : ksopslp@yahoo.co.id TLX : -  
Web-Site : - Fax : 0763 - 33347

**SURAT KETERANGAN  
SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN/RISET**

Nomor : LT.403/01/01/KSOP.SLP-2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADE KURNIAWAN, SE  
NIP : 19810714 200502 1 002  
Pangkat/ Golongan Ruang : Penata (III/c)  
Jabatan : Pelaksana Harian Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan  
Kelas IV Selatpanjang  
Unit Kerja : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV  
Selatpanjang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. SABIQ MUZAKI  
NIM : 11527103117  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Peran Syahbandar Melakukan Pengawasan Dalam Menjamin  
Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Berdasarkan Peraturan  
Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 (Studi di Angkutan  
Pelayaran-Rakyat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan  
Meranti)

Telah selesai melaksanakan kegiatan riset/prariset di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Selatpanjang selama 1 (satu) bulan terhitung mulai dari tanggal **22 Oktober 2019** sampai dengan **18 November 2019** sesuai dengan Surat Keterangan Penelitian dari Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti No. 053/DPMPSTPTK/VI/2019/SKP/158 Tanggal 14 November 2019.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : SELATPANJANG  
Pada Tanggal : 19 November 2019

KEPALA KANTOR  
KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN  
KELAS IV SELATPANJANG  
Pelaksana Harian



**ADE KURNIAWAN, SE**  
Penata (III/c)  
NIP. 19810714 200502 1 002

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Terpadu No. 5 Telp. (0763) 434443 Fax. (0763) 434443  
 SELATPANJANG – RIAU



Kode Pos. 28753

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 550/DISHUB/XI/2019/269

Saya yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **M. SABIQ MUZAKI**  
 NIM : **11527103117**  
 Jurusan : Ilmu Hukum  
 Strata : Sarjana (S.1)  
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau  
 Judul Penelitian : Peran Kesyahbandaran Melakukan Pengawasan dalam Menjamin Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 (Studi Di Angkutan Pelayaran-Rakyat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)

Adalah benar telah melakukan Penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun maksud dan tujuan dari penelitian tersebut adalah dalam rangka melengkapi data untuk keperluan skripsi yang bersangkutan.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selatpanjang, 25 November 2019,

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,**

**Dr. H. AREADY, SE., M.Si**

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19750302 200212 1 004

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
 Jalan Johari Dagang Komplek Perkantoran Bupati, Telp/ Fax. (0763) 33630  
 E-Mail : dpmpstpkmeranti@gmail.com  
**SELATPANJANG**

Kode Pos 28753

**'SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**Nomor : 053/DPMPSTPTK/XI/2019/SKP/158**

**TENTANG :**

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET**  
**DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, setelah membaca surat dari : **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/27447 Tanggal 04 November 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi penelitian kepada :

Nama	: M. Sabiq Muzaki
NIM	: 11527103117
Program Studi	: Ilmu Hukum
Jenjang	: S1
Alamat	: Pekanbaru
Judul Penelitian	: Peran Syahbandar Melakukan Pengawasan Dalam Menjamin Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 (Studi Di Angkutan Pelayaran-Rakyat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)
Lokasi Penelitian	: 1. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait, agar dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini, terima kasih.

Dibuat di : Selatpanjang  
 Pada tanggal : 14 November 2019

**An. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**DAN TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**  
**SEKRETARIS**

**dr. H. MISRI HASANTO, M.Kes**  
 Pembina Tk. I (IV/b)  
 NIP. 19690201 200212 1 001

**Tembusan Disampaikan Kepada Yth :**  
 1. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang;  
 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti;

**UIN SUSKA RIAU**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA : M. SABIQ MUZAKI**  
**NIM : 11527103117**  
**JURUSAN : ILMU HUKUM**  
**JUDUL : PERAN SYAHBANDAR MELAKUKAN PENGAWASAN DALAM MENJAMIN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 51 TAHUN 2015 (studi di angkutan pelayaran-rakyat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)**

**Pembimbing: Mohd. Kastulani, S.H., M.H.**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 26 Agustus 2020,

Pimpinan Redaksi



**M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL**

**NIP. 1988 0430 2019031010**

UIN SUSKA RIAU



## BIOGRAFI PENULIS

M. Sabiq Muzaki, lahir di Batang Malas 03 mei 1996, anak dari ayahanda Hisyam. HR dan ibunda Khurosah dan merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara. Mengawali pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Raudhatul Hidayah Batang Malas selesai pada tahun 2007 melanjutkan ke MTs Raudhatul Hidayah Batang Malas Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dan Selesai pada tahun 2010 dan kemudian melanjutkan ke MA Nurul Hidayah Bengkalis Di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan selesai pada tahun 2014.

Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Jurusan Hukum Difakultas Syariah Dan Hukum melaksanakan kegiatan magang pada tahun tahun 2017 di Kantor Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru dan dilanjutkan dengan kuiah kerja nyata (KKN) di Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau pada tahun 2020 pennis menyelesaikan pendidikan di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi **PERAN SYAHBANDAR MELAKUKAN PENGAWASAN DALAM MENJAMIN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 51 TAHUN 2015 (studi di angkutan pelayaran-rakyat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)** dinyatakan lulus pada tanggal 11 Agustus 2020 dengan nilai IPK terakhir 3,50 yang sangat memuaskan dan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.